



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT KOMISI VII DPR RI
(BIDANG: ENERGI, RISET DAN INOVASI, SERTA INDUSTRI)**

Tahun Sidang	: 2023 – 2024
Masa Persidangan	: V
Rapat	: Ke – 6 (Enam)
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat
Dengan	: Dirut PT PLN (Persero)
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari, tanggal	: Kamis, 30 Mei 2024
Waktu	: Pukul 14.00 WIB s.d Selesai
Tempat	: Ruang Rapat Komisi VII DPR RI Gedung Nusantara I Lantai I
Acara	: <ol style="list-style-type: none">1. Progres Bauran Energi Pembangkit Tenaga Listrik2. Strategi Percepatan Ekosistem Kendaraan Listrik3. Proyeksi Subsidi Listrik Tepat Sasaran Tahun 20254. Progres Program Listrik Desa5. Lain-Lain
Ketua Rapat	: Sugeng Suparwoto (Ketua Komisi VII DPR RI/ F.P. Nasdem)
Sekretaris Rapat	: Misbakhul Hidayat, S.Sos.
Hadir	: A. Stakeholder - Dirut PT PLN (Persero) B. 18 Orang Anggota dari 52 Orang Anggota Komisi VII DPR RI terdiri dari: 18 Orang Anggota Komisi VII DPR RI hadir fisik 34 Orang Anggota Komisi VII DPR RI izin

I. PENDAHULUAN

1. Rapat Dengar Pendapat Komisi VII DPR RI pada Hari Kamis 30 Mei 2024 dibuka pukul 15.30 WIB, dipimpin oleh Sugeng Suparwoto selaku Ketua Rapat Komisi VII DPR RI dari Fraksi Partai Nasdem, dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Ketua Rapat menyatakan agenda Rapat Dengar Pendapat Komisi VII DPR RI dengan acara:
 - a. Progres Bauran Energi Pembangkit Tenaga Listrik
 - b. Strategi Percepatan Ekosistem Kendaraan Listrik
 - c. Proyeksi Subsidi Listrik Tepat Sasaran Tahun 2025
 - d. Progres Program Listrik Desas
 - e. Lain-Lain

II. KESIMPULAN RAPAT

1. Komisi VII DPR RI mendorong Dirut PT PLN (Persero) untuk mempercepat pelaksanaan transisi energi di Indonesia melalui berbagai program diantaranya pembangunan pembangkit listrik berbasis EBET yang lebih agresif guna mendukung pencapaian target *Net Zero Emission* di Tahun 2060.
2. Komisi VII DPR RI mendorong Dirut PT PLN (Persero) untuk mempercepat dan memperbesar ekosistem kendaraan Listrik di Indonesia melalui pemerataan pembangunan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) dan berbagai program lainnya menyesuaikan dengan permintaan yang ada.
3. Komisi VII DPR RI dapat memahami paparan Dirut PT PLN (Persero) terkait besaran subsidi Listrik Tahun Anggaran 2025 sebesar 83.08 Triliun rupiah yang akan dirinci lebih lanjut.
4. Komisi VII DPR RI mendukung PT PLN (Pesero) untuk mendapatkan penugasan dari Pemerintah dalam melaksanakan program listrik desa untuk Tahun Anggaran 2024 dan Tahun-Tahun Anggaran selanjutnya dalam rangka mewujudkan penyediaan listrik bagi seluruh rakyat Indonesia terutama di daerah 3 T (tertinggal, terdepan dan terluar).

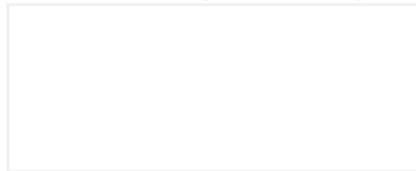
5. Komisi VII DPR RI mendorong Dirut PT PLN (Pesero) untuk berkoordinasi dengan Pemangku Kepentingan lainnya khususnya terkait kemudahan perizinan dalam membangun infrastruktur kelistrikan yang melintasi kawasan hutan.
6. Komisi VII DPR RI meminta Dirut PT PLN (Persero) untuk menyampaikan jawaban tertulis atas semua pertanyaan Anggota Komisi VII DPR RI dan disampaikan paling lambat tanggal 10 Juni 2024.

III. PENUTUP

Rapat ditutup Pukul 18.00 WIB

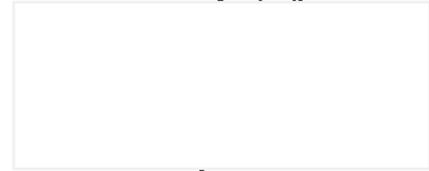
Jakarta, 30 Mei 2024

DIRUT PT PLN (PERSERO)



DARMAWAN PRASODJO

KETUA RAPAT,



SUGENG SUPARWOTO
A-373